

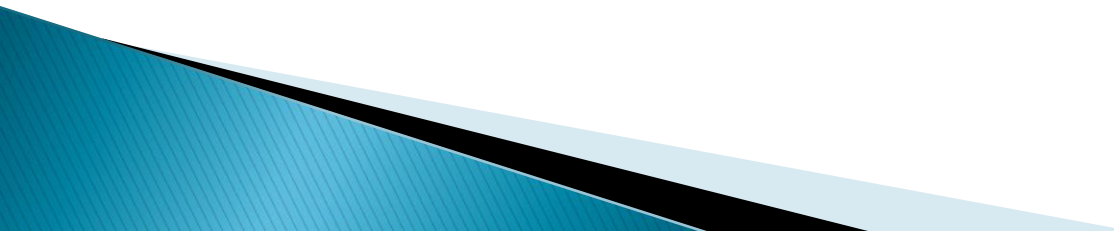
PENGANTAR ILMU POLITIK

(3 SKS)

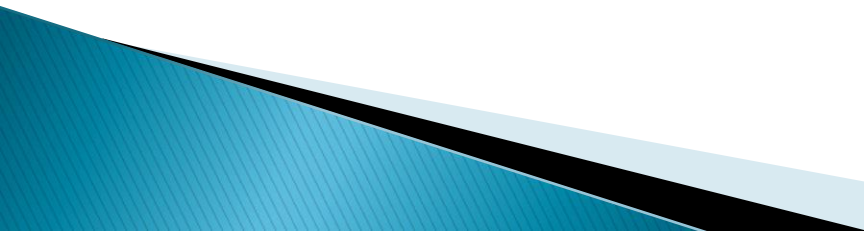
Djoni Gunanto, S.IP, M.Si



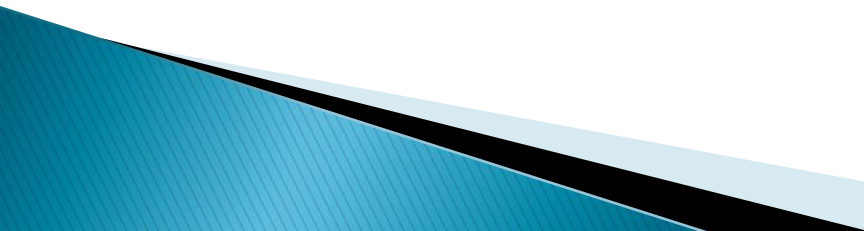
APA ITU POLITIK

- ▶ Dalam keseharian kita sering mendengar kata-kata politik
 - ▶ Ada yang menyatakan bahwa politik itu kotor, ada juga yang bicara bahwa ‘itu terlalu dipolitisir’ atau “wah...dia sudah berpolitik”
 - ▶ Lalu apa yang saudara ketahui tentang politik ?
- 

MANUSIA DAN POLITIK

- ▶ Pada saat manusia harus memenuhi kepentingan dan kebutuhannya disitu perlu politik
 - ▶ Pada saat manusia harus terikat dengan aturan di situlah ada politik
 - ▶ Politik secara praktis terkait dengan strategi (siyasah), kekuasaan, proses pembuatan aturan/policy
- 

MANUSIA DAN POLITIK

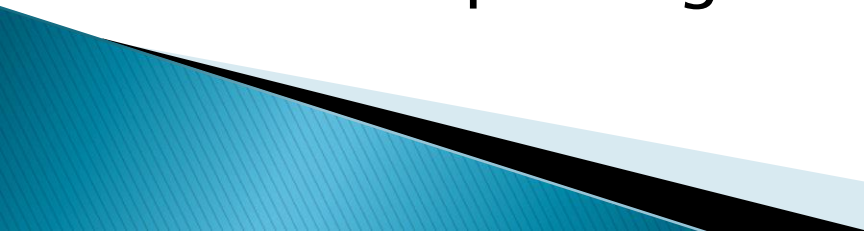
- ▶ Setiap manusia tidak pernah lepas dari politik karena pada prinsipnya manusia adalah zoon politicon
 - ▶ Sebagai individu, anggota keluarga/ masyarakat/ kelompok, manusia memiliki kepentingan dan nilai yang harus dipenuhi
 - ▶ Sebagai anggota masyarakat/ kelompok/ negara manusia juga terikat pada aturan yang melingkupinya.
- 

SECARA UMUM POLITIK adalah

- ▶ Berbagai macam kegiatan dalam sebuah sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan pelaksanaan tujuan. (Miriam Budiardjo, 2000:8)

PELAKU DAN INTERAKSI POLITIK

- ▶ Dalam kehidupan politik terdapat pelaku politik
- ▶ Pelaku politik adalah individu dan/atau kelompok yang memiliki kepentingan/nilai untuk dipenuhi/diperjuangkan dalam pengambilan kebijakan
- ▶ Pelaku politik kelompok dapat berbentuk kelompok2 kepentingan/penekan, ormas, LSM, parpol, mahasiswa dst

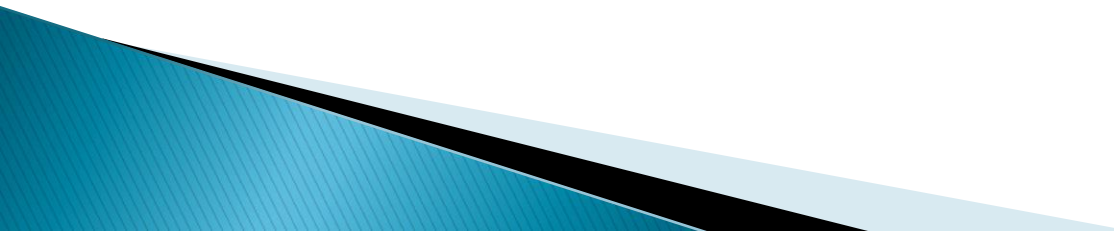
- ▶ Dalam rangka memenuhi kepentingannya inilah individu/kelompok sebagai pelaku politik melakukan interaksi politik.
 - ▶ Interaksi politik adalah hubungan antara dua atau lebih pelaku politik
 - ▶ Interaksi politik biasanya didasarkan pada motif kepentingan/nilai
 - ▶ Interaksi politik dengan kepentingan/nilai yang berbeda bisa menimbulkan KONFLIK
 - ▶ Interaksi politik dengan kepentingan/nilai yang sama bisa menimbulkan KERJASAMA
 - ▶ Konflik bisa berubah menjadi kesepakatan dan kerjasama bila ada negosiasi terhadap kepentingan masing-masing pelaku politik.
- 

ILMU POLITIK

- ▶ Sebagai sebuah ilmu yang memiliki dasar, rangka, fokus dan ruang lingkup yang jelas maka dpt dikatakan ilmu politik msh muda usianya krn baru lahir pada akhir abad ke 19
- ▶ Tetapi bila ilmu politik ditinjau dlm rangka yang lebih luas, yaitu sbg bahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan politik, ilmu politik sudah tua. Contoh : di Yunani Kuno, muncul Herodotus, Plato, Aristoteles dll yang dimulai th 450 sM. Juga di Cina dan India, seperti Confucius dan Darmastra. Juga di Ind pd masa Majapahit sekitar abad 13 M dan 15 M dan Babad Tanah Jawi

- ▶ Di benua Eropa seperti Jerman, Austria dan Perancis, bahasan ilmu politik pada abad ke 18 dan 19 dipengaruhi oleh ilmu hukum dan karenanya fokus perhatiannya negara semata-mata.
- ▶ Di Inggris, bahasan politik masuk dalam filsafat terutama moral philosophy dan tidak dapat dilepaskan dari sejarah.
- ▶ Berdirinya Ecole Libre des Sciences Politiques di Perancis (1870) DAN London School of Economics and Political Science (1895) menjadikan ilmu politik sebagai disiplin ilmu tersendiri dan mendapat tempat dalam kurikulum PT.
- ▶ Di AS, pd tahun 1858, Francis Lieber diangkat sbg guru besar dalam sejarah dan ilmu politik di Columbia College, dan ini merup pengakuan pertama terhadap ilmu politik sbg ilmu tersendiri. Kemudian lahir juga American Political Science (APSA) pada tahun 1904
- ▶ Di Belanda, pd tahun 1947 didirikan Fakulteit der Sociale en Politieke Wetenschappen dan di Indonesia, lahir FISIPOL UGM serta FIS UI yang didalamnya Ilmu Politik jd jurusan tersendiri.

Lima Konsep Pokok Ilmu Politik

- ▶ Negara (*State*)
 - ▶ Kekuasaan (*Power*)
 - ▶ Pengambilan keputusan (*Decision Making*)
 - ▶ Kebijakan (*Policy*)
 - ▶ Pembagian (*Distribution*), atau Alokasi (*Allocation*)
- 

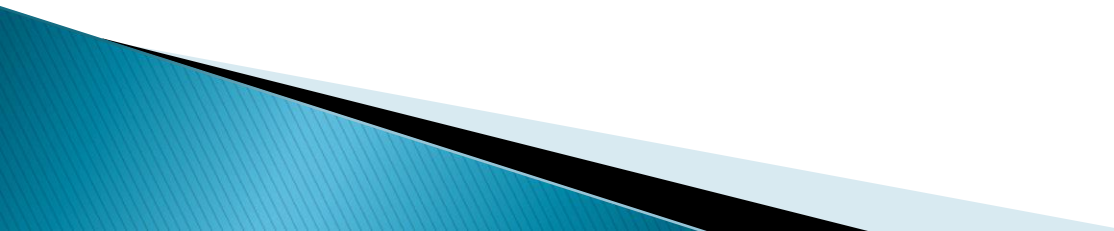
Negara (*State*)

Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik menjelaskan:


“Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan yang sah dan ditaati oleh rakyatnya”

Para sarjana menekankan negara sebagai inti dari politik, memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya.

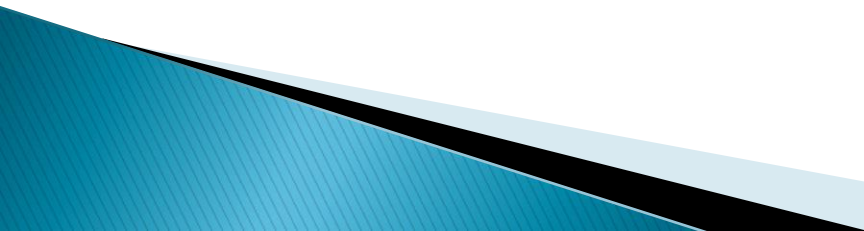
Negara (*State*)

- ▶ Negara adalah alat dari masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.
 - ▶ Negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama
- 

Sifat-sifat Negara

1. Memaksa. Negara secara legal dapat melakukan paksaan terhadap masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mencegah adanya anarki dan penertiban dalam masyarakat tercapai.
 2. Monopoli. Negara memiliki monopoli dalam menetapkan tujuan masyarakat
 3. Mencakup semua. Semua aturan yang telah ditetapkan bersifat general, artinya mencakup seluruh masyarakat.
- 

Unsur-unsur Negara

1. Wilayah. Setiap negara menduduki wilayah tertentu. Kekuasaan negara atas wilayah terdiri dari tanah, laut yang ada di sekelilingnya, dan angkasa di atasnya.
 2. Penduduk. Setiap negara memiliki penduduk dan kekuasaan negara mencakup seluruh penduduknya.
 3. Pemerintah. Setiap negara memiliki organisasi yang memiliki wewenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi penduduknya.
- 

Unsur-unsur Negara

4. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negara memiliki kekuasaan untuk memaksa semua penduduk menaati peraturan/UU (kedaulatan ke dalam-*internal sovereignty*). Negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan dari luar wilayah negara Indonesia (kedaulatan keluar-*external sovereignty*).

Tujuan dan Fungsi Negara

- ▶ Negara dapat dianggap sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari sebuah negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Namun tujuan dari setiap negara berbeda, tergantung kepada ideologi yang dianut.

Negara yang berhaluan Marxisme, bertujuan untuk mencapai masyarakat komunis.

Tujuan dan Fungsi Negara (2)

Negara terlepas dari ideologi yang dianutnya, memiliki fungsi, yaitu:

1. Melaksanakan penertiban (*law and order*). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrok dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban. Dalam hal ini negara dikatakan sebagai stabilisator.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini sangat penting bagi sebuah negara. Indonesia melaksanakan fungsi ini dengan membangun negara melalui usaha REPELITA.

Tujuan dan Fungsi Negara (3)

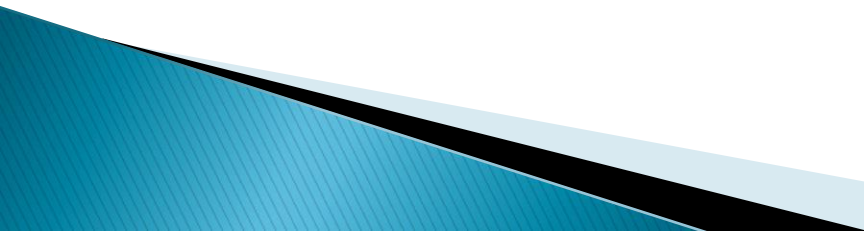
3. **Pertahanan.** Negara perlu memiliki fungsi pertahanan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari serangan luar.
4. **Menegakkan keadilan.** Penegakkan peradilan ini dilaksanakan oleh badan-badan peradilan.

Charles E. Meriam menyebutkan fungsi negara adalah keamanan eksternal, ketertiban internal, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan.

Kekuasaan (*Power*)

- ▶ Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku.
- ▶ Kekuasaan dilihat sebagai inti dari politik. Anggapan ini maksudnya semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan.
- ▶ Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam *Power and Society* mengatakan bahwa: “*Ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.*”

Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)

- ▶ Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai.
 - ▶ Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut segala keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat.
- 

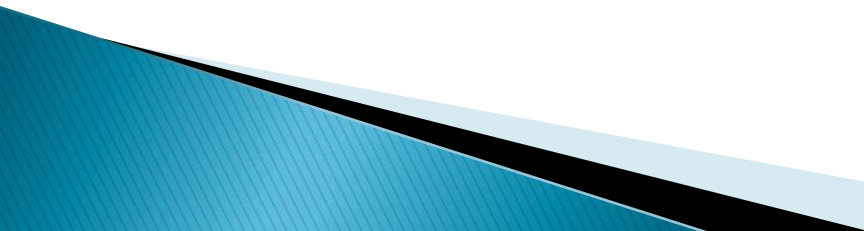
Kebijakan Umum (*Public Policy*)

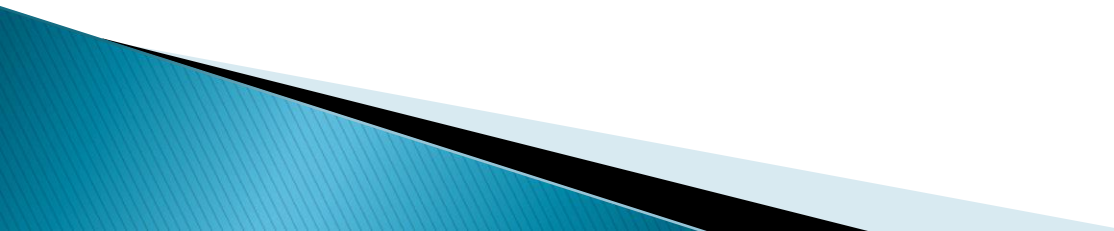
- ▶ Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh pelaku politik (individu atau kelompok), dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.
- ▶ Hoogerwerf: “obyek ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat–akibatnya. Kebijakan umum yang dimaksud adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan.”

Pembagian (*Distribution*), atau Alokasi (*Allocation*)

- ▶ Pembagian (*Distribution*) dan Alokasi (*Allocation*) adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat.
- ▶ Harold D. Laswell mengatakan “politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”
- ▶ David Easton mengatakan “ Sistem Politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat”

HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU LAIN

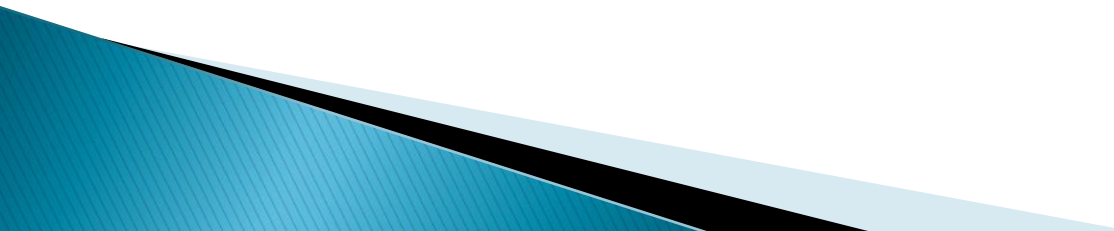
- ▶ Ilmu Sejarah, menyumbangkan bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Sarjana ilmu politik menggunakan data-data sejarah untuk menentukan pola-pola ulangan (recurrent pattern) yang dapat membantu untuk proyeksi masa depan
 - ▶ Filsafat. Ilmu politik erat kaitannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai dari negara.
 - ▶ Ilmu Sosiologi
 - ▶ Ilmu Antropologi
- 

- ▶ Ilmu Antropologi
 - ▶ Ilmu Ekonomi
 - ▶ Ilmu Hukum
 - ▶ Ilmu Komunikasi
- 

KEKUASAAN

- ▶ Kekuasaan merupakan alat tukar dan bargaining dalam berinteraksi politik
- ▶ Sumber-sumber kekuasaan (resources of power):
 - Ekonomi
 - Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - Senjata/Kekuatan Fisik
 - Nilai Moral/Adat
 - Massa
 - Kharisma

LEGITIMASI

- ▶ Sumber2 kekuasaan tersebut tidak ada artinya tanpa adanya legitimasi atas kekuasaan yang dimiliki
 - ▶ Legitimasi dapat melalui proses pemilu, aturan perundang2an, nilai adat dst
 - ▶ Dengan memiliki legitimasi maka kekuasaannya menjadi syah sehingga dapat memiliki kewenangan untuk memerintah.
- 

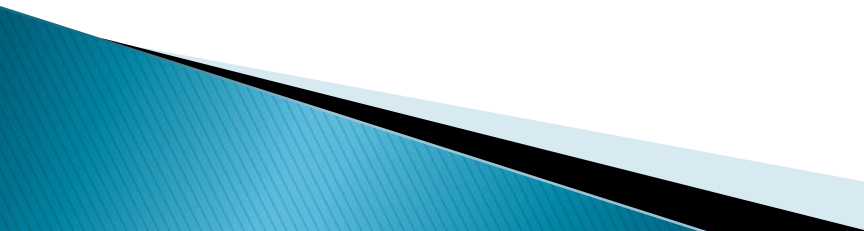
SOSIALISASI POLITIK

- ▶ Proses transformasi/ pembelajaran nilai-nilai suatu masyarakat kepada kelompok/individu atau generasi penerus dalam masyarakat.

PRINSIP PRINSIP SOSIALISASI

- ▶ Sosialisasi berlangsung sepanjang hidup seseorang
- ▶ Sosialisasi politik bisa secara langsung maupun tidak langsung
- ▶ Sosialisasi politik besar pengaruhnya dalam pembentukan karakter / kepribadian politik (*personality politic*) seseorang.

AGEN SOSIALISASI POLITIK

- ▶ Keluarga
 - ▶ Lingkungan Pergaulan/ teman bermain
 - ▶ Sekolah/ pendidikan
 - ▶ Media Massa
 - ▶ Pekerjaan
 - ▶ Kontak Politik Langsung
 - ▶ Sistem Politik/ Pemerintahan
- 

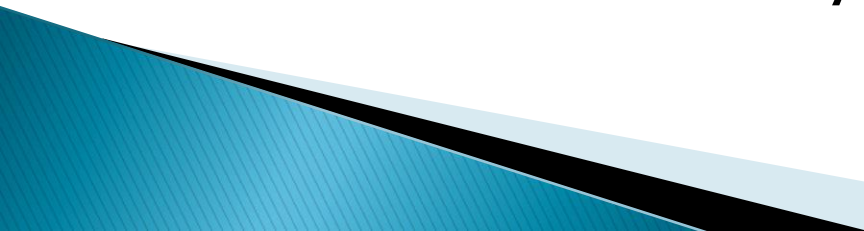
BUDAYA POLITIK

Adalah Tingkat orientasi psikologis masyarakat terhadap dunia politik atau tingkat kehidupan berbangsa dan bernegara


ORIENTASI BUDAYA POLITIK

- Orientasi Kognitif
 - menggambarkan tingkat pengetahuan terhadap masalah-masalah politik
- Orientasi Afektif
 - menggambarkan tingkat perasaan seseorang thd masalah2 politik atau sispol secara keseluruhan
- Orientasi Evaluatif
 - tingkat penilaian dan penentuan sikap pol.

TIPE BUDAYA POLITIK

- ▶ Tipe Parokhial : pengeth dan pemahaman ttg persoalan pol rendah, tak memiliki kepedulian thd pol, bersikap apatis.
 - ▶ Tipe Subyek : punya pengeth dan pemahaman yang cukup tapi tak mau libatkan diri
 - ▶ Tipe Partisan : pengeth dan pemahaman yg memadai disertai kepedulian dan keterlibatan yang cukup tinggi.
- 

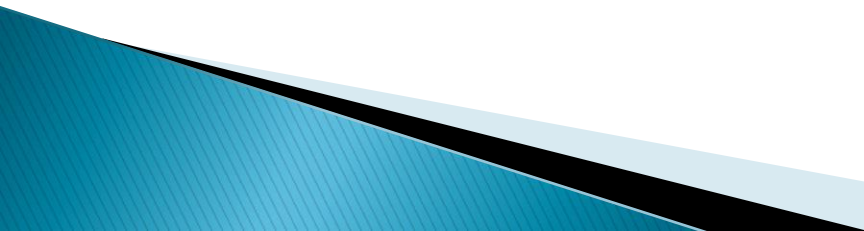
BUDAYA DAN SOSIALISASI POLITIK

- ▶ Sosilaisasi membentuk budaya politik
 - ▶ Sosialisasi mengubah budaya politik
 - ▶ Sosialisasi mempertahankan budaya politik
- 

PARTISIPASI POLITIK

Keterlibatan/ keikutsertaan
warga masyarakat dalam
kegiatan-kegiatan politik

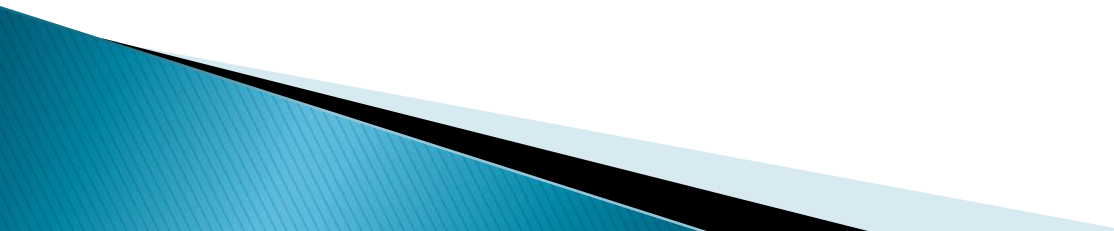
SIFAT PARTISIPASI POLITIK

- ▶ Otonom : Dilakukan secara mandiri, sukarela dan atas kesadaran sendiri
 - ▶ Mobilisasi : dilakukan secara paksa, manipulasi dan rekayasa
- 

KLASIFIKASI PARTISIPASI POLITIK

- ▶ Apatitis : orang yang berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik
- ▶ Spektator : orang yang terlibat secara minimal dalam politik
- ▶ Gladiator : orang yang secara aktif terlibat dlm proses politik spt aktivis partai.
- ▶ Pengkritik : orang yang kritis thd kebijakan pem / kejadian pol ttt, dan melontarkan ide/ pendapat ttg masalah tsb.


PARTISIPASI POLITIK BERDASARKAN KESADARAN DAN KEPERCAYAAN

- ▶ Partisipasi Pol Aktif : Kesadaran Pol tinggi, kepercayaan pd pem tinggi
 - ▶ Partisipasi Pol Apatis : Kesadaran dan Kepercayaan Pol rendah
 - ▶ Partisipasi Pol Pasif : Kesadaran Pol rendah, Kepercayaan pd pem tinggi
 - ▶ Partisipasi Pol Radikal : Kesadaran tinggi, kepercayaan rendah
- 

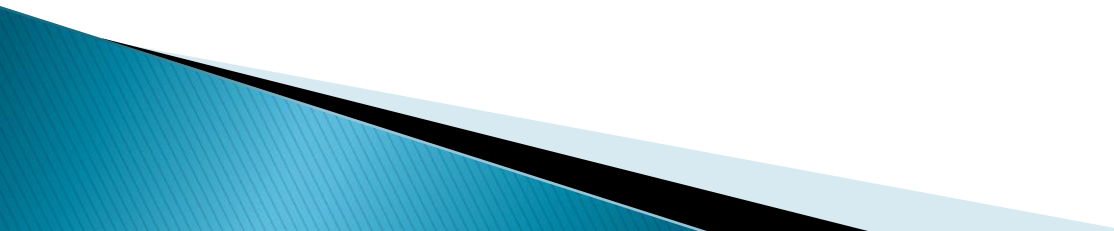
DEMOKRASI

- ▶ Arti : demos : rakyat; kratos/kratein : kekuasaan → kekuasaan di tangan rakyat

Indikator Demokrasi

- ▶ Jaminan HAM
 - ▶ Pemerintahan yang berdasarkan hukum
 - ▶ Partai politik lebih dari satu
 - ▶ Kebebasan berserikat dan berpendapat
 - ▶ Kebebasan pers
 - ▶ Pemilihan umum secara regule dan jurdil
 - ▶ Peradilan yang bebas
 - ▶ Pengakuan hak minoritas
 - ▶ Keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara
 - ▶ Pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertical
 - ▶ Dibukanya ruang control oleh masyarakat
- 

HAK AZASI MANUSIA

- ▶ Hak yang paling dasar yang dimiliki manusia pada segala ruang dan waktu
 - ▶ HAM meliputi: hak politik, hak ekonomi, hak sosial
 - ▶ Dalam pelaksanaan hak politik, peran negara seminimal mungkin mengatur. Sedangkan dalam pelaksanaan hak ekonomi dan sosial justru peran negara sangat dibutuhkan.
- 

Demokrasi Konstitusional

- ▶ Gagasan demokrasi konstitusional: pemerintah terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

Berdasarkan UUD 1945, bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) dan berdasarkan system konstitusi. Jadi demokrasi yang digunakan adalah demokrasi konstitusional yang terbatas kekuasaannya dan tunduk pada *Rule of Law*.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

1. Masa Republik Indonesia I (1945–1959):
Demokrasi Konstitusional
 2. Masa Republik Indonesia II (1959–1965):
Demokrasi Terpimpin
 3. Masa Republik Indonesia III (1965–1998):
Demokrasi Pancasila
 4. Masa Republik Indonesia IV (1998–
sekarang): Reformasi
- 

KELOMPOK KEPENT/ PENEKAN

- ▶ Kel. Kepentingan : Sebuah Kelompok dimana anggota-anggotanya memiliki kepentingan yang sama. Kelomp. ini ada yang terorganisir dan belum terorganisir/ insidental.
- ▶ Kel. Penekan : Kel. Kepentingan yang memiliki tujuan untuk menekan/ mempengaruhi kebijakan.

Tipe Kelompok Kepentingan

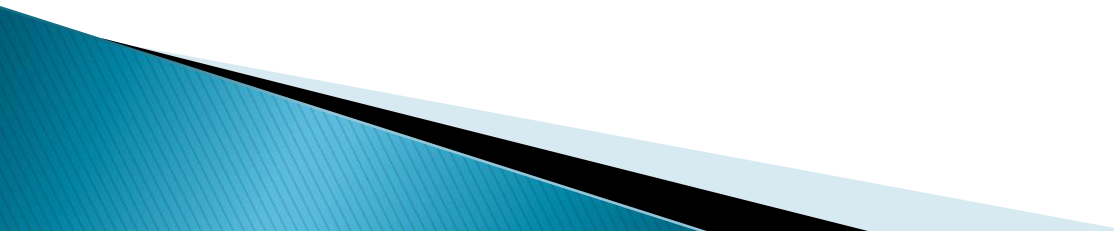
Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell membagi kelompok kepentingan ke dalam empat kategori:

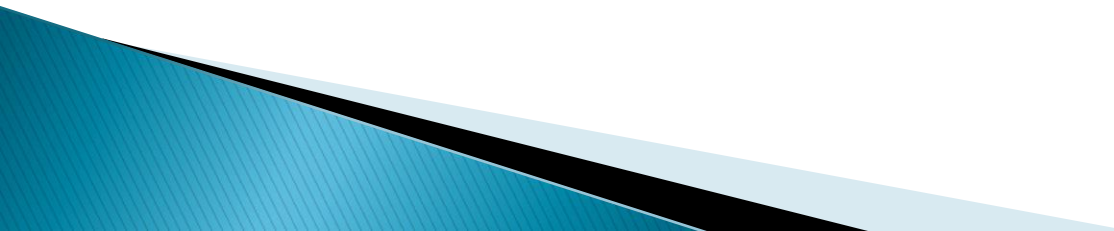
1. Kelompok anomi. Contoh: demonstrasi di Tunisia yang mengakibatkan revolusi.
2. Kelompok nonasosiasional. Contoh: Paguyuban Pasundan.
3. Kelompok institusional. Contoh: Darma Wanita, KORPRI, dll.
4. Kelompok asosiasional. Contoh: Ikatan Dokter Indonesia, Kamar Dagang Indonesia.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

ORGANISASI MASYARAKAT

- ▶ Kelompok masyarakat dimana anggotanya memiliki cita-cita, orientasi dan tujuan yang sama serta sepakat terikat dalam satu kesatuan organisasi.
- ▶ Prasyarat Organisasi :
 - * Kondisi Sosial
 - * Kondisi Teknis
 - * Kondisi Politis

Fungsi Ormas

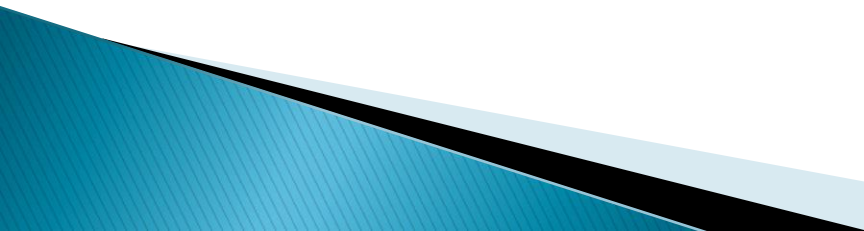
- ▶ Tempat penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya
 - ▶ Pembinaan dan pengembangan anggota dalam usaha menwujudkan tujuan organisasinya
 - ▶ Peran serta dalam pembangunan nasional
 - ▶ Sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat
 - ▶ Sarana pemberdayaan masyarakat
- 

- ▶ Contoh Ormas di Indonesia
 - Muhammadiyah
 - NU
 - FPI
- 

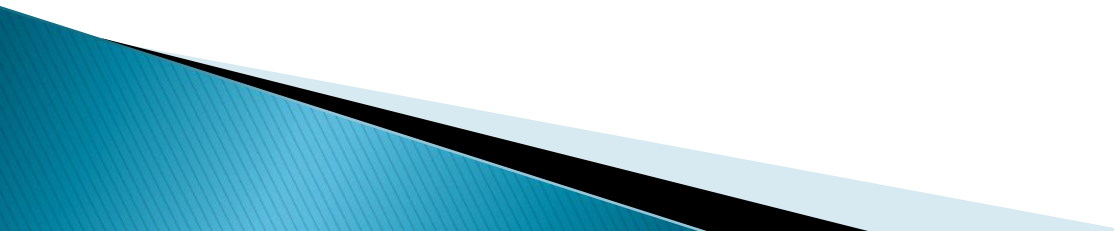
PARTAI POLITIK

- ▶ Suatu kelompok yang terorganisir, dimana anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka

Fungsi Partai Politik

- ▶ Artikulasi kepentingan (interest articulation)
 - ▶ Agregasi/penggabungan kepentingan (interest aggregation)
 - ▶ Sosialisasi politik (political socialization)
 - ▶ Komunikasi politik
 - ▶ Rekrutment politik (political rekrutment)
 - ▶ Sarana Pengatur Konflik (Conflict management)
- 

Peran Partai Politik

- ▶ Sebagai Legitimator
 - ▶ Sebagai Penguasa
 - ▶ Sebagai Oposisi
- 

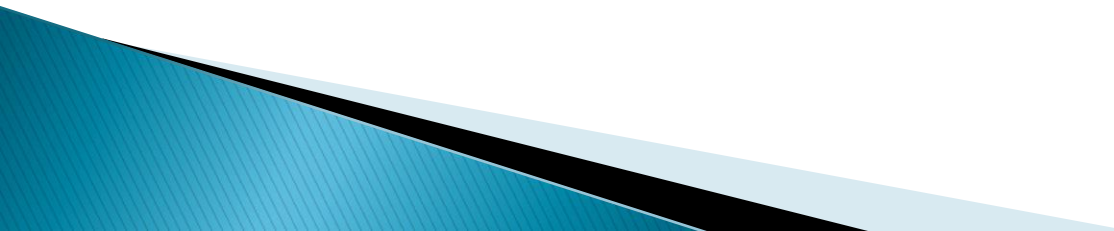
Sistem Kepartaian :

Berdasarkan jumlah, system kepartaian dibedakan atas:

- ▶ Sistem Partai Tunggal
- ▶ Sistem Dwi Partai
- ▶ Sistem Multi Partai

Sistem kepartaian

Berdasarkan jumlah kutub ideologi dan jarak kutub ideologi, system kepartaian dibedakan atas:

- ▶ Sistem pluralisme sederhana
 - ▶ Sistem pluralisme moderat
 - ▶ Sistem pluralisme ekstrem
- 

Kekurangan dan Kelebihan Sistem Kepartaian

	Partai tunggal	Dwi partai	Multi partai
+	<ul style="list-style-type: none">Stabilitas politik dapat diatur dengan mudah, karena tidak ada partai oposisi.	<ul style="list-style-type: none">Kemungkinan adanya kemudahan dalam mengatur stabilitas politik, sebab ada pembagian tugas antara partai pemenang dan oposisi. Partai oposisi sebagai pengawas yang loyal, walaupun ada persaingan namun oposisi tidak berusaha untuk mengubah system politik	<ul style="list-style-type: none">Parpol memiliki fungsi control sosial lebih banyakMasyarakat diberikan ruang untuk berekspresi sesuai dengan visi politiknya.
-	<ul style="list-style-type: none">Negara dengan partai tunggal memungkinkan adanya pemimpin yang dictator. Sebab, semua kekuasaan (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) dikuasai oleh satu partai.	<ul style="list-style-type: none">Menghambat perkembangan partai-partai kecil, sehingga memperkuat system dwi partai.	<ul style="list-style-type: none">Sulitnya menjaga stabilitas politik. Sebab banyak partai yang mendominasi, kemungkinan adanya perbedaan pendapat dan tekanan sangat besar.

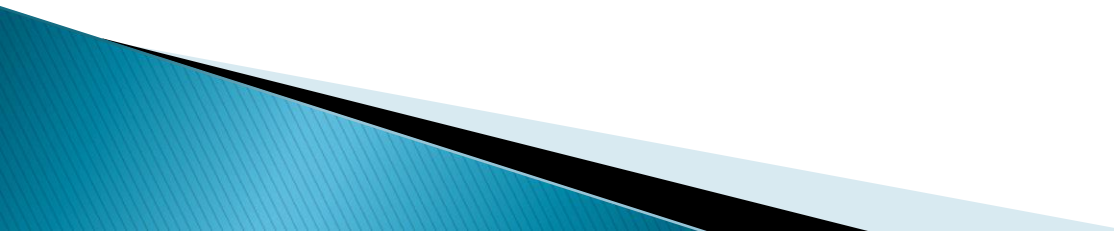
HUBUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN ORMAS

- ▶ Pola Politik Aliran
 - Terdapat keterkaitan yang kuat antara ormas dengan partai politik
 - Ormas menjadi onderbow parpol
 - Keterikatan berdasarkan ideologi
- ▶ Pola Politik Massa Mengambang
 - Tidak ada keterkaitan antara ormas dengan partai politik
 - Masy dekat parpol menjelang pemilu

Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Manfaat Pemilu

- ▶ Pelaksanaan Kedaulatan rakyat.
 - ▶ Memilih pemimpin–pemimpin politik
 - ▶ Sarana sirkulasi elit.
 - ▶ Sarana legitimasi
 - ▶ Sarana partisipasi politik rakyat.
- 

Kesuksesan Pemilu

Pemilu dikatakan sukses dinilai dari:

SUKSES PROSES

Yaitu berjalan secara aman, tertib, partisipasi masyarakat tinggi, damai dan tepat waktu setiap tahapan dan jadwal

SUKSES HASIL atau SUBSTANSI

Yaitu menghasilkan pemimpin yang aspiratif

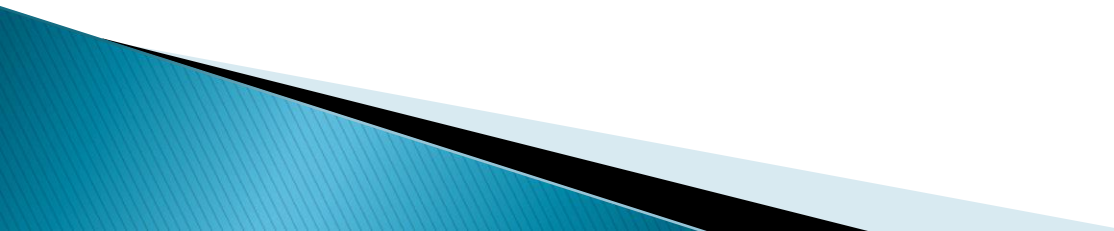
Sistem Pemilu Proporsional (*multy member constituency*)

- ▶ Sistem ini biasanya disebut juga Sistem Perwakilan Berimbang. Adapun ciri-ciri dari sistem ini adalah :
 - Negara dibagi atas beberapa daerah pemilihan dimana masing-masing daerah pemilihan mempunyai *beberapa orang wakil*, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah penduduk (pemilih).
 - Perolehan kursi partai didasarkan atas jumlah suara yang diperoleh
 - Apabila ada kelebihan suara, maka suara yang lebih dapat diperhitungkan
 - Penentuan calon-calon wakil rakyat ditentukan oleh partai politik.

Kelemahan Sist Proporsional

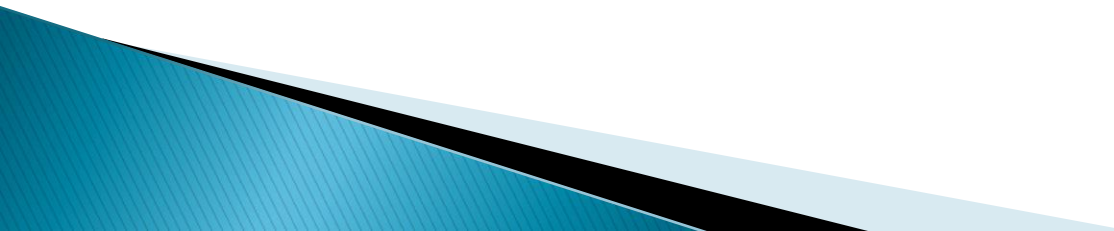
- ▶ Karena perolehan kursi diperhitungkan dari jumlah suara yang diperoleh, maka mendorong tumbuhnya partai-partai kecil
- ▶ Dengan munculnya partai-partai baru dan jumlah partai yang cukup banyak, stabilitas politik relatif sulit untuk dicapai
- ▶ Dengan jumlah partai yang banyak, penyelenggaraan Pemilu menjadi mahal dan kurang efisien.
- ▶ Calon wakil rakyat cenderung lebih dekat dekat parpol yang mendudukkannya daripada rakyat yang memilihnya.


Kelebihan dari sistem Proporsional

- ▶ Tidak ada suara yang hilang, karena kelebihan suara diperhitungkan
 - ▶ Partai-partai kecil tetap dimungkinkan hidup meski kursi yang diperolehnya sedikit. Dengan demikian menjaga pluralisme berdasarkan partai.
- 

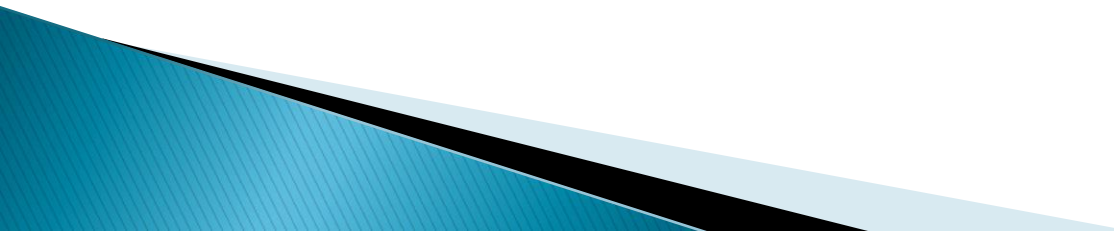
Sistem Distrik (*Single-member constituency*)

- ▶ Negara dibagi atas beberapa daerah pemilihan (distrik) sesuai dengan jumlah kursi di Lembaga Perwakilan, dimana masing-masing distrik diwakili oleh satu orang wakil
- ▶ Partai yang kalah dalam satu daerah pemilihan, perolehan suaranya menjadi hilang dan tidak bisa diperhitungkan secara nasional.

- ▶ Kelemahan Sistem ini :
 - Sistem ini kurang memperhitungkan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan itu terpecah dalam beberapa distrik
 - Sistem ini kurang representatif dalam arti calon-calon yang kalah dalam distrik kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya.
- 

- ▶ Kelebihan dari sistem ini :
 - Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik sehingga ada keterikatan yang kuat antara wakil dengan rakyat yang diwakilinya.
 - Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai karena kursi yang diperebutkan oleh partai-partai pada setiap distrik hanya satu.
 - Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai mempermudah terbentuknya stabilitas politik.
 - Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.
- 

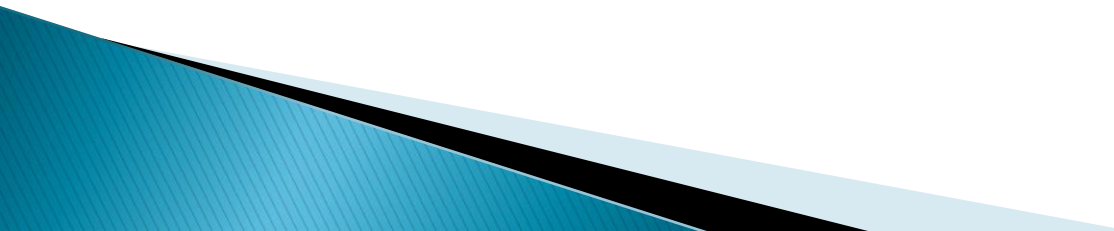
LEMBAGA LEGISLATIF

- ▶ Berasal dari kata legislate (pembuat UU)
 - ▶ Sering disebut Lembaga Perwakilan Rakyat
 - ▶ Oleh karena itu lembaga legislatif adalah lembaga perwakilan rakyat yang bertugas membuat UU
- 

FUNGSI LEGISLATIF

- ▶ Legislasi
 - ▶ Kontrol
 - ▶ Budget
- 

HAK-HAK LEGISLATIF

- ▶ Hak inisiatif
 - ▶ Hak amandemen
 - ▶ Hak interpelasi
 - ▶ Hak Angket
 - ▶ Hak Bertanya
 - ▶ Hak mengajukan Pernyataan
 - ▶ Hak Budget
- 

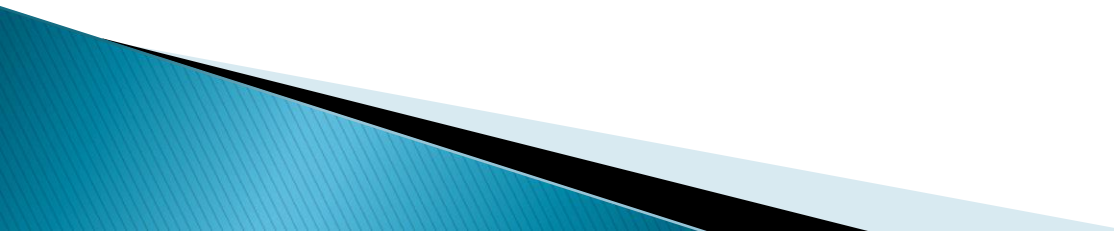
CARA MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF

- ▶ Dipilih
 - ▶ Diangkat
- 

Sistem Perwakilan

- ▶ Uni-cameral (satu kamar)
- ▶ Bicameral (dua kamar)

EKSEKUTIF

- ▶ Arti : merupakan cabang pemerintahan (dalam arti luas) yang bertugas melaksanakan (mengeksekusi) kebijakan (keputusan) yang telah dibuat oleh badan legislative.
 - ▶ disatu sisi harus efektif
 - ▶ disamping itu responsive dan akuntabel
- 

KEKUASAAN LEMBAGA EKSEKUTIF

- ▶ Diplomatik : menyelenggarakan hubungan diplomatic dengan Negara–negara lain
- ▶ Administratif : melaksanakan undang–undang serta peraturan–peraturan lain dan menyelenggarakan administrasi negara
- ▶ Militer : mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta keamanan dan pertahann negara
- ▶ Yudikatif : memberi grasi, amnesty dan sebagainya
- ▶ Legislasi : merencanakan rancangan undang–undang dan membimbingnya dalam badan p;erwakilan rakyat samapai menjadi undang–undang

BENTUK EKSEKUTIF

- ▶ Eksekutif Parlementer
 - ▶ Eksekutif Presidensiil
- 

EKSEKUTIF PARLEMENTER

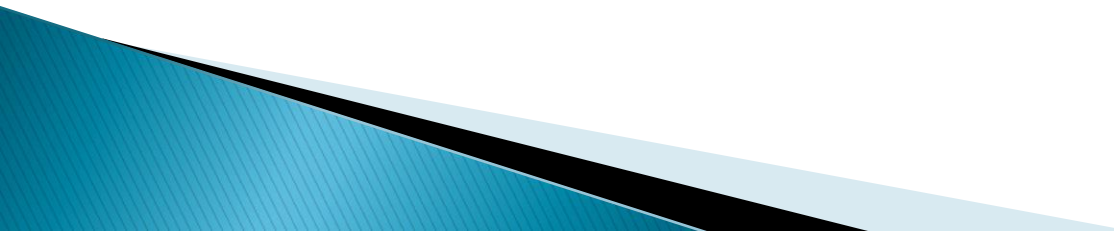
- ▶ Kepala Negara : Presiden/ Raja
- ▶ Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri

Ciri Kepemimpinan :

- ▶ Perdana Menteri (PM) memimpin cabinet
- ▶ PM menerapkan kepemimpinan kolektif melalui kekuasaan koordinasi terhadap para menteri yang masing-masing punya tanggung jawab sendiri kepada parlemen
- ▶ Menteri adalah koleganya PM
- ▶ Organisasi Kabinet :
- ▶ Kabinet adalah himpunan para menteri yang setara kedudukan politisnya.
- ▶ Para menteri adalah suatu tim yang terdiri dari politisi yang otonom
- ▶ Rapat cabinet adalah mekanisme utama pembuatan keputusan eksekutif

- ▶ Pembentukan Kabinet :
- ▶ Raja atau Presiden menunjuk ketua partai pemenang pemilu (mayoritas) atau pemimpin koalisi untuk membentuk cabinet.
- ▶ Formatur memilih menteri dari anggota perlemen lewat tawar mwnawar politik
- ▶ Kabinet harus terdiri dari mentri yang anggota parlemen dan berasal dari prtai mayoritas atau koalisi sehingga mendapat dukungan (mosi percaya dari parlemen.
- ▶ Apabila kabimet telah tersusun bersama programnya dan telah mendapat mosi percaya dari parlemen, maka cabinet dilantik oleh kepala Negara dihadapan pleno parlemen.oleh mosi tidak percaya dari mayoritas anggota parlemen, raja atau presiden menunjuk ketua oposisi menjadi
- ▶ Dalam hal kabiet bubar oleh mosi tidak percaya dari mayoritas anggota parlemen, raja atau presiden menunjuk ketua oposisi menjadi formatur kabinet.

KEKUASAAN KABINET PARLEMENTER

- ▶ Pelaksana kebijakan publik yang dihasilkan oleh parlemen
 - ▶ Bertanggung jawab kepada atau dikontrol oleh parlemen
 - ▶ Membawahi dan mengawasi birokrasi
 - ▶ PM dapat membubarkan parlemen melalui kepala Negara dengan syarat harus menjamin penyelenggaraan Pemilu dalam waktu 2–3 bulan
- 

EFEKTIVITAS KABINET PARLEMENTER

Efektivitas diciptakan melalui:

- ▶ mayoritas dukungan parlemen
- ▶ pengalaman para menteri dalam komisi parlemen
- ▶ partai atau koalisi partai merupakan mekanisme kabinet untuk mempengaruhi parlemen dan rakyat

Kabinet menjadi tidak efektif apabila:

- ▶ partai yang berkoalisi tidak berkompromi (rapuh)
- ▶ oposisi tidak dapat dikalahkan lewat voting atau perdebatan parlemen
- ▶ tidak mendapat dukungan kepala negara secara formal

DEMOKRATISASI KABINET PARLEMENTER

Kabinet menjadi demokratis melalui:

- ▶ Keputusan dibuat secara kolektif
- ▶ Kekuasaan pemerintah dipegang secara kolektif
- ▶ Diawasi oleh oposisi dalam parlemen

Kabinet menjadi tidak demokratis apabila:

- ▶ PM menjadi sangat kuat
- ▶ Manipulasi kekuasaan lewat partai pemerintah yang mayoritas mutlak.

Negara pengguna : Inggris, Australia, Jepang, beberapa Negara bekas jajahan Inggris.

EKSEKUTIF PRESIDENSIAL

- > Kepala Negara maupun kepala pemerintahan ada di tangan Presiden

- > Ciri Kepemimpinan/ Kekuasaan Presiden:
 - ▶ Membawahi semua menteri sebagai pembantunya
 - ▶ Sebagai chief (kepala) terhadap segenap aparat eksekutif
 - ▶ Pengambil keputusan terhadap alternative kebijakan yang dibuat oleh sifatnya
 - ▶ Mendapat mandat kekuasaan secara langsung dari rakyat (melalui Pemilu atau dari lembaga perwakilan Rakyat)

- > Kekuasaan Kabinet (menteri-menteri):
 - ▶ Pelaksana kebijakan public yang dikeluarkan parlemen atas petunjuk presiden.
 - ▶ Bertanggung jawab atau dikontrol Presiden tidak kepada parlemen.

EFEKTIVITAS DAN DEMOKRASI KABINET PRESIDENSIAL

Efektif apabila:

- ▶ Kekuasaan konstitusional
- ▶ Dukungan mayoritas pemilih (rakyat)
- ▶ Menentukan para pembantu (menteri) dari tokoh terbaik.

Demokrasi apabila:

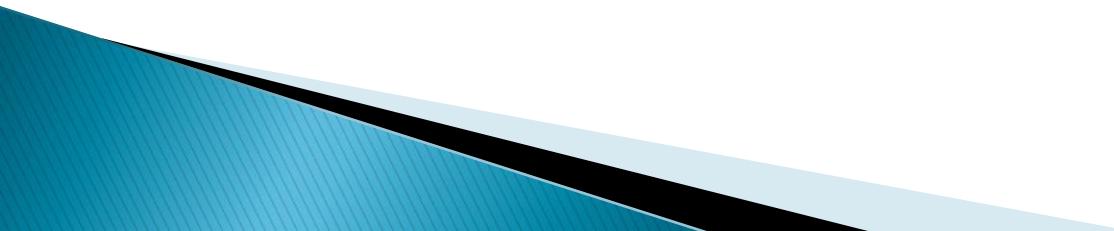
- ▶ Dipilih langsung oleh rakyat
- ▶ Terkontrol dan terimbangi oleh parlemen.
- ▶ Masa kekuasaannya dibatasi.

Negara pengguna : Amerika Serikat, Philipina,
Indonesia

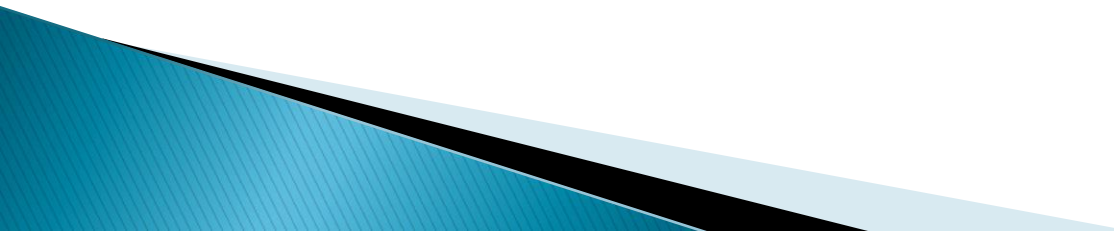
LEMBAGA YUDIKATIF

- ▶ merupakan lembaga yang bertugas menimbang dan mengadili konflik eksekutif dan legislative berdasarkan UUD, dan memberikan keadilan kepada rakyat.

BENTUK YUDIKATIF

- ▶ Sistem Common Law
 - mengenal azas judge made law
 - mengenal azas preceden
 - ▶ Sistem Civil Law
 - mengenal azas kodifikasi hukum
 - mengenal azas yurisprudensi
- 


BIROKRASI

- Merupakan lembaga kenegaraan yang bertugas mengadministrasikan (melaksanakan di lapangan) kebijaksanaan yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif.
 - Sebagai pelaksana, anggota lembaga itu bersifat permanent (duduk pada posisinya sampai pensiun atau berhenti) dan bekerja secara professional (penuh perhatian dan waktu)
 - Sesuai dengan tujuan dan cara kerjanya, dibedakan antara birokrasi sipil dan birokrasi militer.
- 

Kriteria Birokrasi Weber

1. Tugas–tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan.
2. Tugas–tugas tersebut dibagi atas bidang–bidang yang berbeda sesuai dengan fungsi–fungsinya di bidang yang kompeten, yang masing–masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan sanksi–sanksi.
3. Jabatan–jabatan tersusun secara hirarkis, yang disertai dengan rincian hak–hak kontrol dan pengaduan.
4. Aturan–aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis sesuai dengan aturan dan norma.

Kriteria Birokrasi Weber (2)

5. Anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda atau terpisah dengan anggota sebagai individu pribadi.
 6. Pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya.
 7. Administrasi didasarkan pada dokumendokumen tertulis dan hal ini cenderung menjadikan kantor (biro) sebagai pusat organisasi modern.
 8. Sistem–sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat pada bentuk aslinya, sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratik.
- 

Kriteria Birokrasi Weber (3)

Lebih lanjut, dengan mendasarkan pada Dalil ke 8, muncullah temuan isitilah Birokrasi ala Weber, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Pertama, para staf administrasi secara pribadi adalah bebas, mereka hanya menjalankan tugas-tugas apabila diberikan tanggung jawab dan wewenang oleh peraturan.
- b. Kedua, terdapat hirarki jabatan yang jelas.
- c. Ketiga, fungsi-fungsi dalam masing-masing jabatan itu diperinci dengan jelas (job description).
- d. Keempat, para pejabat birokrasi diangkat atas dasar kontrak (ada perodesasi dan evaluasi masa jabatan)
- e. Kelima, para pegawai/pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesional (merit sistem).

Kriteria Birokrasi Weber (4)

6. Keenam, para pejabat digaji dengan uang dan diberi pensiun sesuai kedudukan mereka dalam hirarki.
7. Ketujuh, pekerjaan pejabat adalah pekerjaan utama dan satu-satunya.
8. Kedelapan, ada struktur karir yang memungkinkan kenaikan pangkat baik melalui senioritas, prestasi, atau penilaian lain sesuai kebutuhan atasan.
9. Kesembilan, pejabat tidak dapat mengambil kedudukannya sebagai milik pribadi (begitupun sumber-sumber yang melekat pada jabatannya itu, yaitu fasilitas, anggaran, dan wewenang).
10. Kesepuluh, pejabat tunduk pada suatu pengendalian yang dipersatukan oleh sistem yg disipliner.